



**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2025**

**TARUTUNG  
2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) SKPD berupaya untuk terus melakukan pembenahan agar sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya good governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025 -2026 seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu **“PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA”** .

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2025, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 12 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPBD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menentukan prioritas program kegiatan.
- b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab.

### **Bab I Pendahuluan**

Merupakan Penjelasan, Latar Belakang Penulisan, Landasan Hukum Yang Memuat Maksud Dan Tujuan Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

### **Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Yang Memuat Informasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu Serta Capaian Renstra SKPD.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Menjelaskan Mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program Dan Kegiatan.

## **Bab IV Penutup**

Merupakan Gambaran Kondisi Yang Diharapkan Untuk Pencapaian Pelaksanaan Renja Tahun 2025

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang didasarkan pada hasil pelaksanaan terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dan merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (terlampir kolom 6 dan 8) dan perkiraan Tahun berjalan 2025 diharapkan target pencapaian pelaksanaan 100 %. Hasil-hasil yang telah dicapai pada kegiatan Tahun 2025 merujuk kepada Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, OPD BPBD mengalami perubahan terutama pada program dan urusan.

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>			<b>100 %</b>		
	<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>9 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100 %</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>78</b>
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4</b>	<b>72</b>
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Tahun</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>1 Tahun</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

	ASN	Tunjangan ASN yang dibayarkan								
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2 Laporan	90
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24	
1.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	99
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100 %	50 Dokumen	100 Dokumen	91
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	2 Laporan	98
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	87

	Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>								
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit	8 Unit	97
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	6 Unit	97
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	-	-	-
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>								
1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	-	-	-

		Negara, Keluarga, maupun Petugas								
2.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan	100 %	1 Kawasan	1 Kawasan	100
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								
1.	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100
2.	Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	5 Orang	100
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kaupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 goni	2000 goni	2000 goni	2000 goni	100 %	2000 goni	2000 goni	100
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan</b>	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100

	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ kota	Terlaksananya jumlah aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	0	0	0	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2026.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**

No	Keterangan		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023		2024		2025		2026	
	Tujuan	Indikator Tujuan		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Persen	118	118	118	118	114	118	116	-	114	-	112	-
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Peningkatan Kapasitas daerah	Persen	NA	NA	NA	NA	0,38	0,38	0,38	-	0,38	-	0,38	-
3	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	97,64%	20%	22,42%	22,42%	-	25%	-	30%	-
4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	50,65%	20%	22,37%	22,37%	-	24%	-	25%	-

5	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-
6	Respon Time	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Jam	2x24 Jam	2x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 Jam	1x24 jam	-	5 jam	-	3 jam	-
7	Persentase Bencana Yang ditangani	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Persen	40	90	85	87	87	88	88%	-	50%	-	60%	-
8	Jumlah Kawasan Tangguh Bencana	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Desa dan Kawasan	NA	NA	NA	3	6	5	9	-	1 kawasan	-	2 kawasan	-



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah:

1. Minimnya anggaran yang tersedia dalam penanggulangan bencana;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Banyaknya Laporan Kejadian Bencana yang tidak bisa ditanggulangi;
4. Rendahnya kepedulian dan pemahaman Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah:

1. Keterbatasan dana/Anggaran yang dialokasikan belum memadai.
2. Sumber daya aparatur belum mencukupi
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana jika terjadi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan bencana.
5. Letak Geografis daerah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang merupakan kawasan yang sangat rawan akan bencana baik itu bencana gempa tektonik, longsor dan banjir

Adapun tantangan yang dihadapi dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah :

Tantangan yang dihadapi:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pengurangan bencana yang terkandung dalam UU Nomor 24 Tahun 2008 BNPB sebagai Lembaga yang diamanatkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisiensi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh masih berusia sangat muda apalagi BPBD di daerah-daerah;

2. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
3. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
4. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
5. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan Penanggulangan bencana.

sedangkan Peluang yang kita rasakan dengan terbentuknya BPBD di Kab. Tap. Utara terkait dengan UU No. 24 Tahun 2008 sebagai dasar Hukum yang menjamin tertanggannya isu penanggulangan bencana dan isu terkait lainnya, selain itu dengan kehadiran BNPB dan BPBD, penganggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpaduh, menyeluruh dan efektif-efisien. Peluang selanjutnya adalah semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecendrungan perubahan iklim global yang dampaknya semakin memburuk.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan BPBD perencanaanya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang tantangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integritas antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dengan kata lain dengan keberadaan geografis Kabupaten Tapanuli Utara yang sangat rentan akan bencana maka sangat diperlukan pembenahan sarana dan prasarana sehingga akan memungkinkan meminimalis dampak yang terjadi. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan BPBD setelah penetapan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan semua usulan terakomodir di dalam rancangan awal RKPD tersebut.

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.245.504.291	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.245.504.291	
2	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana	100%	251.425.250	Program Penanggulangan Bencana	Tapanuli Utara	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana	100%	251.425.250	

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Ket
		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>100 Persen</b>			
	<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BPBD</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>29.479.325</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>BPBD</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>12 Bulan</b>		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>BPBD</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>12 Bulan</b>	<b>4.772.050</b>	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BPBD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>12 Bulan</b>		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>BPBD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>12 Bulan</b>	<b>4.246.475</b>	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>BPBD</b>	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	<b>12 Bulan</b>		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>BPBD</b>	Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja	<b>12 Bulan</b>	<b>20.460.800</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2.617.242.092</b>	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BPBD</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	<b>12 Bulan</b>		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>BPBD</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	<b>12 Bulan</b>	<b>2.571.394.892</b>	
2.	Pelaksanaan	<b>BPBD</b>	Jumlah Penatausahaan	<b>12 Bulan</b>		Pelaksanaan	<b>BPBD</b>	Jumlah Penatausahaan	<b>12 Bulan</b>	<b>41.347.200</b>	

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	4.500.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BPBD	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	205.747.000	
1.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.601.500	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	14.999.300	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	5.235.000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	16.631.200	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Dokumen	16.989.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	142.291.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		251.818.056	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.200.000	

2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	32.159.100	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan	218.419.056	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>		198.521.525	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	162.227.100	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	21.200.725	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	15.093.700	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>			<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>		<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>		241.092.000	

	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>75.000.000</b>	
1.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Desa	75.000.000	
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	BPBD	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	BPBD	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>143.692.000</b>	
1.	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	BPBD	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	82.000.000	
3.	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	5 Orang	4.000.000	
4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana		<b>57.692.000</b>	
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	BPBD	<b>Jumlah Data dan Informasi Bencana</b>			<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	BPBD	<b>Jumlah Data dan Informasi Bencana</b>	12 Dokumen	<b>22.400.000</b>	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	12 Dokumen	20.000.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	BPBD	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan			Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	BPBD	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		2.400.000	

	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ kota	BPBD	Terlaksananya jumlah aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ kota	BPBD	Terlaksananya jumlah aparatur BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)		0	
--	--	------	---	--	--	--	------	---	--	---	--



## **2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam usulan program dan kegiatan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Tahun 2024 dan tidak membuka usulan kepada Masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui :

- √ Mekanisme Ekonomi
- √ Program pro rakyat (pro poor dan pro job)
- √ Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro environment), penurunan emisi gas rumah kaca, pengendalian pencemaran, penurunan laju kerusakan.
- √ Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- √ Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan

Tugas pokok dan fungsi BPBD sangat terkait dengan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **Tujuan Renja SKPD**

Tujuan Renja SKPD adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun atau waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor
- b. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
- d. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas.
- e. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintergrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
- f. Mengembangkan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

## **Sasaran Renja SKPD**

Sasaran Renja SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan . Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
- b. Meningkatnya fasilitas pendukung sarana prasarana kantor bagi aparatur
- c. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kantor
- d. Meningkatnya informasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
- e. Meningkatnya sistem koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
- f. Meningkatnya sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **a. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan**

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait. Program merupakan penjabaran dari visi dan misi serta pilihan tindakan sesuai dengan manajemen risiko, visi penanggulangan bencana secara jelas menyebutkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Pertimbangan program didasarkan pada tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama Dinas/Instansi, Kantor dan Badan Pemerintah.

Ditingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu Penanggulangan resiko bencana ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional penanggulangan resiko bencana dan forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan resiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor

swasta dan Perguruan Tinggi hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan resiko bencana.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (RP)
							4	5	6	7	8	9	10
					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3.543.889.998				3.496.929.541
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan layanan penunjang yang tertangani	Tapanuli Utara	100%	3.302.807.998			100%	3.245.504.291
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TerlaksananyaPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	100%	29.479.325			100%	20.999.998
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya pendukung untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tapanuli Utara	1 Dok	4.772.050	DAU		1 Dok	2.999.998
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan	Tapanuli Utara	1 Dok		DAU		1 Dok	3.000.000

					Ikhtisar Realisasi Belanja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.246.475				
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Evaluasi kinerja	Tapanuli Utara	1 Dok	20.460.800	DAU			<b>15.000.000</b>
2	11	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>Tapanuli Utara</b>	<b>100%</b>	<b>2.617.242.092</b>			100%	<b>2.621.607.543</b>
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	12 bln	2.571.394.892	DAU		12 bln	<b>2.576.264.343</b>
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan tersedianya jasa administrasi keuangan	Tapanuli Utara	12 bln	41.347.200	DAU		12 bln	<b>42.343.200</b>
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	12 bln	4.500.000	DAU		12 bln	<b>3.000.000</b>
2	11	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tapanuli Utara	100%	205.747.000	DAU		100%	<b>156.581.600</b>
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	100%	9.601.500	DAU		12 bln	<b>6.986.700</b>
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Tapanuli Utara	100%	14.999.300	DAU		12 bln	<b>14.996.100</b>
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	100%	5.235.000	DAU		12 bln	<b>2.999.000</b>

1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Tapanuli Utara	100%	16.631.200	DAU		12 bln	<b>16.712.000</b>
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Tapanuli Utara	100%	16.989.000			12 bln	<b>14.996.800</b>
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	100%	142.291.000	DAU		12 bln	<b>99.891.000</b>
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tapanuli Utara	100%	<b>251.818.056</b>	DAU			<b>249.315.800</b>
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	100%	1.200.000	DAU		12 bln	<b>2.000.000</b>
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	100%	32.199.000	DAU		12 bln	<b>28.896.600</b>
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Tapanuli Utara	100%	218.419.056	DAU		12 bln	<b>218.419.200</b>
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>	Tapanuli Utara	100%	198.521.525	DAU			<b>196.999.350</b>
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	100%	162.227.100	DAU		8 Unit	<b>159.993.650</b>
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	100%	21.200.725	DAU		6 Unit	<b>21.999.600</b>

1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapanuli Utara	100%	15.093.700	DAU		1 Unit	<b>15.006.100</b>
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>	Tapanuli Utara	100%	241.092.000	DAU		100%	<b>251.425.250</b>
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Tapanuli Utara	100%	75.000.000	DAU		100%	<b>54.233.250</b>
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tapanuli Utara	100%	75.000.000	DAU		1 Kawasan	<b>54.233.250</b>
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tapanuli Utara	100%	0	DAU		-	-
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Tapanuli Utara	100%	143.692.000	DAU			<b>117.192.000</b>
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	82.000.000	DAU		12 Bulan	<b>79.880.000</b>
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	4.000.000	DAU		12 Bulan	<b>10.000.000</b>



1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100%	57.692.000	DAU		12 Bulan	<b>27.312.000</b>
1	05	03	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Tapanuli Utara	100%	22.400.000	DAU			<b>80.000.000</b>
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Tapanuli Utara	100%	20.000.000	DAU		-	-
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	Tapanuli Utara	100%	2.400.000	DAU		-	-
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ kota	Terlaksananya jumlah aparat BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	Tapanuli Utara	100%	0	DAU			<b>80.000.000</b>

**RENCANA KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN 2025**

NO	Urusan Bidang	Lokasi	Indikator Kinerja				Tahun Anggaran 2025
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BPBD	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>20.999.998</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.999.998
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Terlaksananya Laporan Evaluasi kinerja	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja	12 Laporan	15.000.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BPBD	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2.621.607.543</b>

1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	2.576.264.343
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	42.343.200
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BPBD	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	<b>Jumlah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	<b>156.581.600</b>
1.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Tersedianya Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.986.700
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	14.996.100
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD	Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	2.999.000
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	16.712.000
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dokumen	14.996.800

6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	99.891.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		249.315.800
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	28.896.600
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Bulan	218.419.200
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BPBD	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan</b>		<b>196.999.350</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPBD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	159.993.650
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	21.999.600

3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	15.006.100
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	BPBD	<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>		<b>Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana</b>		<b>251.425.250</b>
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	BPBD	<b>Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>54.233.250</b>
1.	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Terlaksananya Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	54.233.250
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Terlaksananya jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 Kecamatan	Terlaksananya jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15 Kecamatan	-
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>117.192.000</b>
1.	Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	BPBD	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	12 Dokumen	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	12 Dokumen	79.880.0000

2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	10.000.000
3.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Orang	27.312.000
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	BPBD	<b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>80.000.000</b>
1.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD	Terlaksananya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	20.000.000
2.	Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	BPBD	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	3.000.000
3.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ kota	BPBD	Terlaksananya jumlah aparat BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	60 Orang	Terlaksananya jumlah aparat BPBD dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis didalam Menyusun dokumen kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana (R3P)	60 Orang	80.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Tapanuli Utara, sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2025 adalah:

1. Menurunnya resiko bencana
2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat pra, tanggap dan transisi
3. Meningkatnya pemulihan pascabencana

Melalui Rencana kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Rencana kerja BPBD dalam mencapai sasaran memiliki 2 program, 8 Kegiatan dan tertuang melalui 25 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaann perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Penanggulangan Bencana

#### Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

#### Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

#### Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota






**BAB V**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2020-2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KEPALA PELAKSANA,**

  
**BONGGAS FREDDY PASARIBU, S.Pt**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196711211998031002**